

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia yang dibutuhkan ialah sumber daya yang mempunyai kemampuan menguasai, menerapkan, dan mengembangkan IPTEK, serta daya saing yang tinggi. Sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan yang dapat merangsang otak, menyentuh, dan menggerakkan jiwa dan raga, serta mampu mendorong dan membangkitkan gairah semangat peserta didik untuk melakukan tindakan nyata berdasarkan pengetahuan dan keyakinan akan kebenaran yang dikuasainya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 disebutkan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Guru sebagai pendidik dituntut mempunyai kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan keinginan harapan dan pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam mendidik dan membina anak didik. Dalam mencapai mutu pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru.

Guru mempunyai sifat dan perilaku yang berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang dalam melakukan pekerjaan itu tanpa didasari rasa tanggung jawab. Selain itu, ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat waktu dan tidak mematuhi peraturan. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rendahnya kualitas guru tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi organisasi maupun guru itu sendiri.

Perilaku kewarganegaraan organisasi adalah perilaku individu yang ekstra dari kewajibannya, yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem kerja yang formal dan secara agregat

¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3

mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan perilaku individu yang ekstra, yang tidak secara langsung dapat dikenali dalam suatu sistem kerja formal, dan secara keseluruhan mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Organisasi percaya bahwa untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja individual yang tinggi, karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja kelompok kerja dan akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kinerja yang baik menuntut perilaku guru yang diharapkan sesuai dengan organisasi. Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi saat ini adalah tidak hanya perilaku *in-role*, tetapi juga perilaku *extra-role*. Perilaku *extra-role* disebut juga sebagai Perilaku kewarganegaraan organisasi. Perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku guru sehingga guru tersebut dapat disebut sebagai anggota yang baik. Perilaku ini cenderung melihat seseorang (guru) sebagai anggota organisasi.

Namun pada kenyataannya, di kutip dari salah satu media online, berita mengenai “Jokowi: Sibuk Ngurus SPJ, Banyak Guru Tidak Fokus Mengajar”

Detik.com -. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai banyak birokrat yang menghabiskan energi untuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibandingkan fokus pada substansi pekerjaan. Hal tersebut sangat mengganggu berjalannya program pemerintah. "Saya berikan contoh sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena mengurus SPJ. Saya lihat di sekolah-sekolah itu SPJ. Saya lihat di ruangan guru kwitansi-kwitansi SPJ itu pasti," kata Jokowi.²

Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan pengawas Sekolah Menengah Pertama Wilayah 1 Jakarta Timur, Bapak Didin Supriyatna dan Bapak Suparno, yang mengatakan:

Pada kenyataannya, perilaku inisiatif atau suka rela guru masih kurang atau bahkan tidak ada. Mereka hanya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan berdasarkan intruksi atau perintah pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya minat guru untuk mengikuti seminar tanpa ada perintah pimpinan, enggan membimbing guru baru (induksi) dengan suka rela dan mendampingi siswa ketika ada kegiatan perlombaan.³

²<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3302053/jokowi-sibuk-ngurus-spi-banyak-guru-tidak-fokus-mengajar> (diakses pada tanggal 1 november 2016,pukul 09.14)

³ Pengawas SMPN Wilayah 1 Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 2017

Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasi guru sukar untuk dilakukan. Berbagai hambatan atau permasalahan menghalangi tercapainya perilaku kewarganegaraan organisasi tersebut. Masalah atas rendahnya tingkat perilaku kewarganegaraan organisasi dipicu oleh faktor-faktor yang dapat memengaruhinya antara lain kepemimpinan pelayanan guru.

faktor eksternal Perilaku kewarganegaraan organisasi, yaitu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan pelayanan merupakan salah satu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan dalam berbagai organisasi. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandanganya holistik, dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Gaya kepemimpinan pelayanan menunjukkan peran perilaku pemimpin dalam proses kepemimpinannya dimana hal tersebut dapat menimbulkan perilaku kewarganegaraan organisasi pada guru.

Kenyataannya masih ada guru yang tidak memiliki kesadaran dalam bersikap dan berperilaku dengan baik, Padahal kepribadian seorang guru mempengaruhi guru tersebut untuk tetap tinggal dan bertahan akan segala kondisi memprihatinkan yang diterima. Guru yang memiliki kepribadian yang baik lebih cenderung bertahan bekerja untuk organisasi dan cenderung terlibat dalam perilaku organisasi yang melampaui deskripsi tugas dan peran mereka, serta membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stress guru lainnya. Guru yang tidak

memiliki kepribadian yang baik cenderung bersikap menentang dalam hubungannya dengan kepemimpinan dan enggan menampilkan perilaku perilaku kewarganegaraan organisasi karena kontribusi yang mereka berikan kepada tempat bekerjanya tidak sebanding dengan yang ia dapatkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang permasalahan Hubungan Antara Kepemimpinan Pelayanan Dengan Perilaku Kewarganegaraan Organisasi Guru SMP Negeri di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: penguasaan guru terhadap IPTEK, kurangnya kesadaran serta inisiatif guru, kepribadian guru yang beraneka ragam, kurangnya rasa tanggung jawab guru terhadap pekerjaan, adanya hubungan antara guru dan atasan yang kurang harmonis.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti. Peneliti membatasi penulisan pada variabel kepemimpinan pelayanan sebagai variabel bebas dan variabel perilaku kewarganegaraan organisasi sebagai variabel terikat. Subjek penelitian yang merupakan sasaran dari penelitian adalah guru di SMPN kecamatan matraman, Jakarta timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan pelayanan dengan perilaku kewarganegaraan organisasi guru di SMPN kecamatan matraman, Jakarta Timur?”

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai acuan untuk lebih memahami konsep kepemimpinan pelayanan, dan Perilaku kewarganegaraan organisasi guru SMP Negeri di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai masukan dan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta mendapatkan pengalaman baik secara penelitian, isi, dan cakrawala berpikir, khususnya tentang hubungan antara kepemimpinan pelayanan dengan perilaku kewarganegaraan organisasi di SMP Negeri di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

- b. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menjadi tambahan wawasan mengenai hubungan antara kepemimpinan pelayanan dengan Perilaku kewarganegaraan organisasi guru SMP Negeri di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.